

OPTIMALISASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Victor Theodorus Welado Buineij

NPP. 29.1843

Asdaf Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: torvicbuineij@gmail.com

ABSTRACT

The Background Jayapura Regency is an area that has a level of insecurity against natural disasters. Natural disaster events that occur include landslides, earthquakes, flash floods and even the potential impact of tsunamis. The potential for natural disaster insecurity in Jayapura regency makes people always have to be aware of the impact of natural disasters. **The purpose** of this research is to optimize the preparation of a budget work plan at the Jayapura Regency Disaster Management Agency. This research uses qualitative **methods**, because the focus of the research is related to the activity program in 2021 which has not been optimal sub-activities and the output of the results of activities so as to make services to the community slow. The focus of this research is post-disaster handling and the preparation of contingency plans by describing through several indicators to optimize the preparation of the budget work plan of the Jayapura Regency Countermeasures Agency. **The results** of this study explained that in the preparation of the budget work plan of BPBD Jayapura Regency has not been optimal based on post-disaster handling through post-disaster rehabilitation and reconstruction indicators there are post-disaster funds that should be in the field of rehabilitation and reconstruction but the funds are not on target, namely being in the field of preparedness that makes the implementation of house construction even rehabilitation and reconstruction The people did not walk until there was a mass demonstration. But there are still some obstacles, namely post-proficient changes or unexpected events, lack of human resources, BPBD activities in one village rejected by the community for certain reasons. There are several efforts in optimizing the preparation of budget work plans, namely the government's response to community needs, improving human resources specifically in the field of Technology science and Socialization, Communication, Information, and disaster-prone education. **The conclusions** that can be optimized for the preparation of the Budget Work Plan at BPBD have been well realized, but in the course of it still need to be improved because in one of the fields there is a program of activities whose funds are quite large and not in accordance with these fields. The inhibiting factor for optimizing the preparation of the BPBD RKA is the lack of human resources and there are still many people whose proposals are not accommodated due to insufficient budget ceilings

Keywords : Optimization, Preparation of Budget Work Plan, Jayapura Regency

ABSTRAK

Latar Belakang Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana alam. Peristiwa bencana alam yang terjadi meliputi tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang bahkan dampak potensi tsunami. Potensi kerawanan bencana alam pada kabupaten jayapura membuat masyarakat selalu harus waspada terhadap dampak bencana alam. **Tujuan** dari penelitian ini adalah mengoptimalkan penyusunan RKA pada BPBD Kabupaten Jayapura. Penelitian ini menggunakan **metode** kualitatif, karena fokus penelitiannya berhubungan

dengan program kegiatan terdapat pada renja tahun 2021 yang dimana belum optimalnya sub kegiatan beserta keluaran hasil kegiatan sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat. Adapun fokus penelitian ini adalah penanganan pascabencana dan penyusunan rencana kontijensi dengan di deskripsikan melalui beberapa indikator guna menjalankan optimalisasi penyusunan RKA BPBD Kabupaten Jayapura. **Hasil penelitian** ini menjelaskan bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran BPBD Kabupaten Jayapura belum optimal berdasarkan penanganan pascabencana melalui indikator rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana terdapat dana pascabencana yang seharusnya dana tersebut berada di bidang rehabilitasi dan rekontruksi melainkan dana tersebut tidak tepat sasaran yakni berada pada bidang kesiapsiagaan hal tersebut yang membuat pelaksanaan pembangunan rumah bahkan rehabilitasi dan rekontruksi kepada masyarakat tidak berjalan sehingga terjadi demonstrasi massal. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu terjadi perubahan post mahir atau kejadian diluar dugaan, kurangnya sumber daya manusia, kegiatan BPBD disalah satu kampung ditolak masyarakat dengan alasan tertentu. Terdapat beberapa upaya dalam optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran yaitu respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan SDM khusus Bidang Ilmu Teknologi dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan edukasi rawan bencana. **Kesimpulan** yang di dapat Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada BPBD telah terealisasi dengan baik akan tetapi dalam perjalanannya masih perlu untuk di tingkatkan karena pada salah satu bidang terdapat program kegiatan yang dananya cukup besar dan tidak sesuai dengan bidang tersebut. Factor penghambat Optimalisasi penyusunan RKA BPBD adalah kurangnya sumber daya manusia dan masih banyak masyarakat yang usulannya tidak diakomodir dikarenakan pagu anggaran yang tidak mencukupi

Kata Kunci : Optimalisasi, penyusunan rencana kerja anggaran, Kabupaten Jayapura

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menerbitkan peraturan daerah terkait penanggulangan bencana dan Pemerintah Kabupaten Jayapura juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2013 oleh Kabupaten Jayapura 9 September 2013 BAB III Tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksana teknis akan membantu Pemerintah dalam pelaksanaan upaya dan upaya penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Jayapura Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memiliki kewenangan guna melaksanakan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sumber daya manusia tersebut dapat dioptimalisasi dengan cara Pembinaan Aparatur Sipil Negara maupun Masyarakat. Tujuan dari pembinaan tersebut agar Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Jayapura. Mengingat kesiapsiagaan aparatur sipil negara dan masyarakat dikabupaten jayapura dalam menghadapi bencana belum optimal, berdasarkan data pada Rencana Kerja 2021 program sub kegiatan penanganan pascabencana dengan keluaran sub kegiatan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana dan juga program sub kegiatan penyusunan rencana kontijensi dengan keluaran sub kegiatan jumlah dokumen kampung kontijensi yang disusun adapun realita di lapangan sampai saat ini demonstrasi massal yang dilakukan dalam menuntut rehabilitasi dan rekontruksi rumah rusak berat, rumah rusak sedang, rumah rusak ringan belum dilakukan yang seharusnya ada kegiatan fisik atau relokasi tempat tinggal warga masyarakat yang terdampak banjir ke tempat yang leebih aman dan juga rencana kontinjensi seharusnya pada tahun 2020 kegiatan ini sudah harus dimunculkan dalam renja 2020 karena pascabencana banjir bandang terjadi pada bulan Maret

2019 sehingga pada renja 2021 sudah harus reaksi atau action daripada kontijensi, hal ini yang membuat kegiatan tersebut pada renja tidak optimal yang disajikan dalam rencana kerja anggaran 2021 terlambat.

Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana alam. Peristiwa bencana alam yang terjadi meliputi tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang bahkan dampak potensi tsunami. Potensi kerawanan bencana alam pada kabupaten jayapura membuat masyarakat selalu harus waspada terhadap dampak bencana alam. Bencana alam dapat terjadi kapan saja oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk menjaga dan terus melestarikan lingkungan agar bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Jayapura pada tahun 2019 merupakan bencana alam yang termasuk dalam kategori parah mengakibatkan muncul korban jiwa serta kerugian harta benda. Kabupaten Jayapura Secara fisik, wilayah tersebut berpotensi sangat rentan terhadap bencana alam. secara fisiologis relatif terjal dan memiliki banyak sungai – sungai yang mengalir dari Gunung Cyclop.

Selain itu penyebab terjadinya bencana alam di kabupaten jayapura karena apabila debit curah hujan meningkat bersamaan terjadilah longsor di Gunung Cyclop maka banjir dari sungai – sungai yang mengalir dari Gunung Cyclop akan meluap sehingga terjadi banjir. hal ini membuat perlunya mengkaji ulang program kegiatan kerjasama antara BPBD dan BMKG pada daerah setempat sehingga harus segera dikaji peta kerentanan yang menyajikan informasi probabilistik, yaitu informasi tentang kemungkinan terjadinya bencana berikutnya dan juga membuat desa tanggap bencana dalam mengurangi risiko agar setiap informasi mengenai perkiraan cuaca baik buruknya dan potensi dampak akan terjadinya bencana alam dapat di ketahui masyarakat supaya masyarakat mewaspadaai terhadap terjadinya bencana alam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan akan disusun melalui usulan penelitian dengan mengambil judul “ Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura”

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal hasil penelitian

Adi Nuroho dengan judul Analisis penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 pada yayasan dompet dhuafan republika, selanjutnya Dewi dengan judul Skripsi Analisis Proses Penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Dinas pekerjaan umum kabupaten deli serdang, dan Riska Septiana dengan judul. Skripsi analisis penyusunan anggaran pada kantor camat delitua kabupaten deli serdan tahun anggaran 2017-2019. Terdapat beberapa perbedaan diantara ketiga penelitian ini diantaranya adalah Penelitian sebelumnya mengenai analisis proram dan kegiatan yang telah dicapai sedangkan penulis meneliti menoptimalkan program kerja yang dihasilkan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

1. Adi Nuroho dengan judul Analisis penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 pada yayasan dompet dhuafan republika,2013. Menggunakan metode Kuantitatif.

- Penelitian ini mengenai penyusunan rencana kerja anggaran. Penelitian sebelumnya meneliti mengenai analisis penyusunan RKA sedangkan penulis meneliti optimalisasi rencana kerja menggunakan metode kualitatif
2. Dewi, dengan judul Skripsi Analisis Proses Penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Dinas pekerjaan umum kabupaten deli serdang 2012 . menggunakan metode Kualitatif. Persamaannya, Mengetahui proses penyusunan rencana kerja anggaran pada SKPD. Perbedaannya Penelitian sebelumnya meneliti tentang strategi dalam menyusun RKA sedangkan penulis meneliti optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran
 3. Riska Septiana dengan judul Skripsi analisis penyusunan anggaran pada kantor camat delitua kabupaten deli serdan tahun anggaran 2017-2019. Menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini melaksanakan riset tentang penyusunan anggaran yang didasarkan pada renja skpd Penelitian sebelumnya mengenai analisis proram dan kegiatan yang telah dicapai sedangkan penulis meneliti menoptimalkan program kerja yang dihasilkan

1.5. Tujuan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penyusunan rencana kerja anggaran di Kabupaten Jayapura

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan Teori Winardi pada tahun 1999 tentang Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Kepemdagri nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 16 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kemudian menurut Arikunto (2013) menyatakan bahwa Metode dokumen mencari data tentang hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, buku harian, jurnal, entri, risalah, rapat, catatan, pesanan untuk hari itu, dan lainnya.(Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), p. hlm. 274.) Dalam wawancara kualitatif (qualitative interview) menurut Creswell (2016) peneliti dapat

melakukan face-to-face interview (wawancara berhadapan – hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan via telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok. (John W. Creswell, *Research Design : Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), p. hlm. 254.) Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada BPBD Kabupaten Jayapura

Optimalisasi Penanganan Pascabencana

Pada dimensi penanganan bencana perlu dibuat rencana kerja anggaran yang baik. Menurut winardi (1999 :363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki . sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja anggaran perlu di perhatikan beberapa persyaratan rencana kerja menurut wilson 2009 : 467, diantaranya adalah

- Logis dan masuk akal
- Bersifat kebenaran bukan imajinasi
- Simpel dan tidak hiperbola
- Sistematis dan ilmiah

- Obyektif
- Fleksibel



- Bermanfaat
- Optimasi dan efisiensi

Menurut Deddi Nordiawan (2005:90) “berdasarkan pedoman penyusunan RKA-OPD, kepala OPD menyusun RKA-OPD RKA-OPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.” Hal ini sejalan dengan rencana kerja anggaran yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta pembiayaan sebagai dasar atau landasan penyusunan APBD. Jika pelaksanaan penyusunan rencana anggaran telah dibuat dan disusun maka akan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran. Daftar pelaksanaan anggaran atau yang disingkat DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu DIPA dapat digunakan untuk alat pengendali, pelaksana, pelaporan, pengawasan, dan perangkat pemerintah sehingga semua kegiatan kebencanaan yang berada dalam DIPA dapat dilaksanakan selama satu tahun berjalan dengan tidak melampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun persyaratan yang dimaksud dalam menyusun rencana kerja : BPBD Kabupaten Jayapura dengan beberapa kebijakan program telah menyusun kegiatan pada berbagai bidang agar tetap terlaksananya penanganan pascabencana. Dalam pembuatan kebijakannya BPBD mengacu pada UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan hingga saat ini kebijakannya terus menerus diperbaharui tergantung pada kondisi dan situasi. Pada dasarnya kebijakan mengacu pada beberapa peraturan seperti Permendagri No 101 tahun 2018 yang didalamnya menjelaskan standar pelayanan sub-urusan bencana dimana terdapat bagian-bagiannya yaitu :

- a. Jenis pelayanan dasar Pada bagian ini dijelaskan bahwa BPBD kabupaten/kota yakni kabupaten jayapura harus memberikan pelayanan seperti memberikan informasi, merespon bencana darurat, mengaktifasi sistem komando untuk mengelola keadaan darurat bencana, melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta menanggapi kebutuhan dasar korban bencana
- b. Mutu pelayanan dasar Yang dimaksud pada bagian ini BPBD kabupaten/kota yakni kabupaten jayapura dalam penanggulangan bencana harus mengikuti standar prosedur operasional, memiliki sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia dan menyediakan layanan kepada penduduk dapat bencana dan mereka yang telah menjadi korban bencana.

c. Kriteria penerima Maksud dari kriteria penerima adalah dimana warga yang menjadi korban atau warga yang tinggal pada kawasan rawan bencana wajib menerima pelayanan dari BPBD seperti di Kabupaten Jayapura yang wilayahnya menjadi kawasan rawan banjir akan dibangun talud, agar banjir tersebut tidak merugikan warga sekitar bahkan tidak menimbulkan korban.

d. Tata cara pemenuhan standar Dalam pemenuhan standar diatas diperlukan tata cara yang tepat agar semuanya berjalan secara sistematis dan tepat sasaran tahapan yang dilakukan seperti mengumpulkan data, menghitung segala kebutuhan dari pelayanan dasar, menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar. Dalam memenuhi kriteria sebagai syarat rencana kerja dalam suatu organisasi atau instansi maka delapan hal tercantum diatas harus dilaksanakan sebagaimana mestinya

3.2 Faktor Penghambat Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD Kabupaten Jayapura

a. Terjadi Perubahan post mahir atau kejadian diluar dugaan.

penyelenggaraan program kegiatan dalam menyusun rencana kerja anggaran di lapangan yakni output pelaksanaan penanganan pascabencana masih terhambat dalam hal pegawainya dan juga kondisi yang terjadi diluar dugaan. Misalnya ketika terjadi bencana pagu anggaran pada BPBD sudah ditentukan kemudian dengan adanya bencana maka akan diusulkan kembali ke dalam anggaran perubahan pada DPA tahun berjalan.

b. Kurangnya Sumber daya manusia

Peran masyarakat dalam manajemen kebencanaan sangat dibutuhkan bahkan sangat penting demi kesuksesan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah terutama BPBD. Masyarakat Kabupaten Jayapura masih kurang sumber daya dalam kebencanaan masih banyak yang harus perlu diberdayakan

c. Kegiatan di salah satu kampung / desa masyarakat tolak dengan alasan tertentu

Pada program kegiatan BPBD yang akan dilaksanakan di salah satu kampung/ desa tentunya masyarakat sering atau biasanya menolak dengan berbagai alasan tertentu, hal ini mengakibatkan pengakomodir usulan masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang tidak diakomodir. Seperti yang dikatakan oleh kasubbag program BPBD Kabupaten Jayapura menyatakan : “Usulan masyarakat biasanya diusulkan dan di tindaklanjuti oleh BPBD jika usulan tersebut ada di renja BPBD dan pagu anggarannya cukup maka akan diakomodir akan tetapi jika pagu anggaran tidak cukup maka tidak di akomodir”

3.3 Upaya yang Dilakukan Dalam Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada BPBD Kabupaten Jayapura

1. Respon Pemerintah terhadap Kebutuhan Masyarakat

Pada proses penyusunan rencana kerja anggaran tentunya segala upaya yang mendukung proses tersebut dilakukan dengan maksimal dan fasilitas yang memadai. Tidak dapat pungkiri kadang ada

usulan dari masyarakat yang akan diakomodir karena usulan tersebut telah ada didalam rencana kerja yang di konversikan kedalam rencana kerja anggaran lalu diakomodir seperti contohnya terjadi bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, dll. tentunya masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah berupa seng, paku, semen, bantuan logistik sandang, pangan, dan papan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut merupakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui kesigapan pemerintahan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten jayapura.

2. Peningkatkan Sumber Daya Manusia Khusus Bidang Ilmu Teknologi

pemerintah kabupaten jayapura melalui penyusunan rencana kerja anggaran pastinya melalui aplikasi SIPD yang digunakan. Berkaitan hal tersebut proses penyusunan rencana kerja anggaran dalam upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan secara kontinue. Adapun pelatihan yang diberdayakan pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran output yang diharapkan dari pelatihan ini adalah lahirnya pengetahuan tambahan.

3. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana

Kabupaten jayapura melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dll...sebelum terjadi pascabencana alam. Informasi mengenai kebencanaan sangatlah penting dan meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan bagi masyarakat, disamping edukasi pemanfaatan sarana komunikasi juga sangat mendukung penyampaian informasi kebencanaan melalui program-program yang telah disusun dalam rencana kerja anggaran.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian sebelumnya meneliti mengenai analisis penyusunan RKA sedangkan penulis meneliti optimalisasi rencana kerja menggunakan metode kualitatif, Penelitian sebelumnya meneliti tentang strategi dalam menyusun RKA sedangkan penulis meneliti optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran ,Penelitian sebelumnya mengenai analisis proram dan kegiatan yang telah dicapai sedangkan penulis meneliti mengoptimalkan program kerja yang dihasilkan

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini mengenai penyusunan rencana kerja anggggaran dan untuk mengetahui proses penyusunan rencana kerja anggaran pada SKPD

IV. KESIMPULAN

Dari hasil lapangan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada BPBD telah terealisasi dengan baik akan tetapi dalam perjalanannya masih perlu untuk di tingkatkan karena pada salah satu bidang terdapat program kegiatan yang dananya cukup besar dan tidak sesuai dengan bidang tersebut.
2. Factor penghambat Optimalisasi penyusunan RKA BPBD adalah kurangnya sumber daya manusia dan masih banyak masyarakat yang usulannya tidak diakomodir dikarenakan pagu anggaran yang tidak mencukupi

3. Upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Jayapura adalah merespon dengan cepat keadaan yang terjadi diluar dugaan, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan ketrampilan dalam bidang IT serta sosialisasi, edukasi, simulasi rawan bencana kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar BPBD Kabupaten Jayapura perlu dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab tidak boleh terjadi motif perilaku tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPBD Kabupaten Jayapura dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

V. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Arikunto, S.2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi).Jakarta: Rineka Cipta

John W. Creswell. (2016). *Research Design Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Keempat, Y). Pustaka Pelajar...

Winardi. (1999). *Pengantar Manajemen Penjualan*. PT. Citra Aditya.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Kepemdagri nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 16 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. Sumber Lain

Hesti Dwi Astutik. (2019). Optimalisasi Kinerja Bappda Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Semarang Tahun 2016. *Skripsi*. <http://lib.unnes.ac.id/34019/1/3312412013maria.pdf>

Ilosa, A., & Sukri, S. Al. (2021). *Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa*. 12, 44–58

Ramadhansari, I. F. (2020). *Empat Tindakan Prioritas Pengurangan Risiko Bencana*. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201023/15/1309186/empat-tindakan-prioritas-pengurangan-risiko-bencana>

Rusdianto. (2019). *Bab II Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran 2.1. Anggaran*. 6–27.

Rencana Kerja. (n.d.). *123dok.Com*. <https://text.id.123dok.com/document/wyeen2x0y-pengertian-rencana-kerja-syarat-syarat-perencanaan-atau-rencana-kerja.html>

D. Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2019 Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura